

ANALISIS PENILAIAN KETANGGUHAN DESA (PKD) DI KABUPATEN BLITAR

Ficky Adi Kurniawan^{1*}, Anggoro Budi Prasetyo¹, Ifiane Nurul Handayani¹, Surya Heppy Kurniasari¹, Inggit Fandayati¹, Zainal Fatah¹, Yulis Bigan Data¹

¹Pujiono Centre Yogyakarta, Indonesia

*E-mail: angieprast@gmail.com

Diterima: 20/09/2025

Direvisi: 12/02/2025

Dipublikasikan: 21/04/2025

ABSTRACT

Indonesia is a country that has a fairly high potential for natural disasters. Based on disaster risk assessment. Blitar Regency has 10 potential disasters, namely floods, flash floods, extreme weather, high waves and abrasion, earthquakes, forest and land fires, drought, volcanic eruptions, landslides and tsunamis. Assessing village resilience has become an important focus along with increasing efforts to increase village resilience following the high number of disaster events in Indonesia. The disaster resilience assessment aims to produce basic data (baseline) on aspects that influence village resilience. Data collection methods used in village resilience assessment research in Blitar Regency include FGD, observation, and documentation review. Next, the collected data is processed using the application in the BNPB preparedness catalog. The assessment results show that of the 248 villages/sub-districts in Blitar Regency, 170 villages/sub-districts are in the pratama category with a score index of <58.33, 61 villages/sub-districts are in the intermediate category with a score index of 58.33 - 83.33 and 17 villages/sub-districts are in the main category with a score index > 83.33. There are around 17 priority threats chosen by villages/sub-districts in Blitar Regency.

Keywords: Assessment, Resilience, Village, Blitar Regency

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi. Berdasarkan pengkajian risiko bencana. Kabupaten Blitar memiliki 10 potensi bencana yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang tinggi dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor dan tsunami. Penilaian ketangguhan desa telah menjadi salah satu fokus penting bersamaan meningkatnya usaha peningkatan ketangguhan desa menyusul tingginya jumlah kejadian bencana di Indonesia. Penilaian ketangguhan bencana bertujuan menghasilkan data dasar (baseline) tentang aspek-aspek yang mempengaruhi ketangguhan desa. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian penilaian ketangguhan desa di Kabupaten Blitar meliputi FGD, observasi, dan telaah dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan aplikasi yang ada di katalog kesiapsiagaan BNPB. Hasil penilaian menunjukkan dari 248 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar sebanyak 170 desa/kelurahan berada pada kategori pratama dengan indeks skor < 58.33, sebanyak 61 desa/kelurahan berada pada kategori madya dengan indeks skor 58.33 - 83.33 dan 17 desa/kelurahan berada pada kategori utama dengan indeks skor > 83.33. Terdapat sekitar 17 prioritas ancaman yang dipilih oleh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar.

Kata Kunci: Penilaian, Ketangguhan, Desa, Kabupaten Blitar.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 di antaranya termasuk gunung berapi aktif. Sebagian dari gunung berapi terletak di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung berapi aktif yang lebih dikenal dengan *Ring of Fire* atau cincin api (Damayanti, 2018). Rangkaian tersebut berinteraksi dengan sistem mediteran, yang menghasilkan deretan gunung api yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara (Wibowo & Sembri, 2016).

Fenomena pemanasan global telah menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem di Bumi, yang dipicu oleh aktivitas manusia secara global (Kurniawan, Fauziah, & Rohmatulloh, 2024). Penyebab utama pemanasan global adalah gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida, yang menyerap dan memerangkap panas dari sinar matahari di atmosfer, sehingga suhu Bumi meningkat. Kenaikan suhu global yang terus berlangsung menyebabkan perubahan cuaca ekstrem di seluruh dunia (Syahadat dkk., 2022). Perubahan ini tidak hanya mencakup kenaikan suhu, tetapi juga perubahan pola cuaca, intensifikasi bencana alam, dan pergeseran ekosistem (Kurniawan et al., 2024).

Definisi bencana menurut Internatinal Strategi for Disaster Reduction (UN-ISDR-2009) adalah : “*A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of the affected community/society to cope using its own resources*”. Yang artinya : Suatu kejadian, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau berlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya.

Bencana adalah suatu kejadian alam, buatan manusia, atau perpaduan keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi kelangsungan kehidupan. Dalam kejadian tersebut, unsur yang terkait langsung atau terpengaruh harus merespons dengan melakukan tindakan luar biasa guna menyesuaikan sekaligus memulihkan kondisi seperti semula atau menjadi lebih baik (Priambodo, 2013).

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 bencana merupakan Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bencana adalah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menimbulkan dampak negative yaitu korban jiwa, kerusakan pada lingkungan sekitar, kerugian harta benda dan mengakibatkan dampak psikologis.



Gambar 1. Sebaran Kejadian Bencana Alam Periode 1 Januari - 30 Oktober 2023

Sumber: (BNPB, 2023)



Gambar 2. Sebaran Kejadian Bencana Alam Periode 1 Januari – 12 Juli 2024

Sumber: (BNPB, 2024)

Berdasarkan gambar 1, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui data bencana Indonesia tahun 2023 periode 1- 30 Oktober 2023, total bencana yang terjadi di Indonesia berjumlah 3274. Bencana tersebut menyebabkan banyak dampak seperti

korban jiwa, luka-luka, hilang, mengungsi dan merusak rumah-rumah maupun fasilitas publik. Data tertinggi menunjukkan bahwa 4 bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah cuaca ekstrim dengan jumlah 916 kejadian, bencana Banjir dengan jumlah 915 kejadian, kebakaran hutan dengan jumlah 784 kejadian dan tanah longsor dengan jumlah 459 Kejadian. Sementara itu, gambar 2 menerangkan per tanggal 1 Januari - 12 Juli 2024 total bencana yang terjadi di Indonesia adalah 1.028 kejadian dengan didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrim (BNPB, 2024).

Wilayah Kabupaten Blitar memiliki luas 1.588, 79 km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2023) yang terdiri atas 22 kecamatan 220 desa dan 28 kelurahan. Secara topografi Kabupaten Blitar memiliki topografi yang beragam. Terdapat Gunung Kelud dan Gunung Kawi dengan lereng yang curam di bagian utara dan deretan pegunungan kapur di bagian selatan. Kabupaten Blitar memiliki pantai yang cenderung curam hingga datar di bagian selatannya dan dilalui oleh Sungai Brantas tepat di tengah kabupaten. Kabupaten Blitar memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Rata-rata curah hujan harian kabupaten Blitar adalah sebesar 13,77 mm, dengan jumlah hari hujan sebanyak 59 hari. Kondisi curah hujan berpengaruh terhadap potensi bencana. Curah hujan tinggi yang didukung oleh kondisi topografi berupa dataran rendah berpengaruh terhadap banjir. Secara geologi, Kabupaten Blitar ditutupi oleh batukapur berumur oligosen-miosen dan batuan hasil aktivitas gunungapi berupa tuf, batupasir, dan breksi, serta endapan aluvial dari sungai brantas. Selain itu Kabupaten Blitar dilalui struktur berupa sesar-sesar geser yang erat kaitannya dengan zona akresi hasil subduksi lempeng Indo-Australia. Berdasarkan pengkajian risiko bencana.

Berdasarkan data dari website Satu Data Kabupaten Blitar, jumlah kejadian bencana dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2019–2024) menunjukkan bahwa bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem, tanah longsor, dan banjir. Bencana cuaca ekstrem tercatat mengalami fluktuasi dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 83 kejadian, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 63 kejadian setelah sempat menurun di tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, kejadian tanah longsor cukup signifikan, terutama pada tahun 2023 dengan 45 kejadian, meskipun sempat menurun drastis di tahun 2020 menjadi hanya 5 kejadian. Banjir juga menjadi bencana yang konsisten terjadi, dengan puncaknya pada tahun 2022 tercatat sebanyak 22 kejadian.

Secara keseluruhan, jumlah kejadian bencana tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 145 kejadian, diikuti oleh tahun 2019 sebanyak 129 kejadian, dan tahun 2024

sebanyak 128 kejadian. Selain tiga jenis bencana utama tersebut, beberapa kejadian lain seperti gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain turut menyumbang angka kejadian, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Adapun beberapa jenis bencana seperti letusan gunung api, tsunami, dan konflik sosial tidak tercatat terjadi selama periode tersebut. Berikut ini merupakan tabel jumlah kejadian bencana di kabupaten blitar dalam kurun waktu 6 tahun yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Kejadian Bencana di Kabupateb Blitar

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bencana Banjir Bandang	Kejadian	2	3	2	4	2	4
2	Jumlah Bencana Cuaca Ekstrem	Kejadian	83	15	30	61	29	63
3	Jumlah Bencana Epidem Dan Wabah Penyakit	Kejadian	0	1	1	1	1	0
4	Jumlah Bencana Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	Kejadian	0	0	2	0	1	1
5	Jumlah Bencana Gempa Bumi	Kejadian	0	0	2	0	3	5
6	Jumlah Bencana Konflik Sosial	Kejadian	0	0	0	0	0	0
7	Jumlah Bencana Letusan Gunung Api	Kejadian	0	0	0	0	0	0
8	Jumlah Bencana Likeufikasi	Kejadian	0	0	0	9	1	0
9	Jumlah Bencana Tanah Longsor	Kejadian	16	5	37	33	45	25
10	Jumlah Bencana Tsunami	Kejadian	0	0	0	0	0	0
11	Jumlah Kebakaran Hutan Dan Lahan	Kejadian	5	0	0	0	6	14
12	Jumlah Kejadian Bencana Banjir	Kejadian	6	4	13	22	5	3
13	Jumlah Kejadian Bencana Kekeringan	Kejadian	0	0	0	0	1	2
15	Kejadian Bencana Lainnya	Kejadian	17	5	3	15	19	11
Jumlah Kejadian Bencana			129	33	90	145	113	128

Sumber: <https://data.blitarkab.go.id>

Sementara itu potensi bencana yang terdapat pada Kabupaten Blitar berdasarkan kajian risiko bencana KRB Kabupaten Blitar tahun 2019-2023, terdapat 10 potensi bencana dan 6 (enam) diantaranya pernah terjadi yaitu banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, gempabumi, dan letusan gunungapi. Media menuliskan bencana banjir bandang lahar dingin pernah terjadi beberapa kali di Kabupaten Blitar. Banjir bandang

tersebut berasal dari Gunung Kelud akibat hujan deras yang terjadi pada daerah tersebut. Selain Banjir bandang, bencana gelombang ekstrim dan abrasi diberitakan pernah melanda pesisir Kabupaten Blitar. Sementara itu untuk bencana tsunami dan kebakaran hutan dan lahan belum pernah terjadi di Kabupaten Blitar. Bencana-bencana tersebut dikategorikan berpotensi disebabkan kondisi daerah dan faktor penyebab bencana (faktor alam, non alam, maupun ulah manusia). Penetapan potensi bencana tersebut berdasarkan metodologi pengkajian dan kesepakatan daerah Kabupaten Blitar. Berikut ini merupakan 10 potensi bencana yang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Potensi Bencana di Kabupaten Blitar

Potensi Bencana di Kabupaten Blitar	
1. Banjir	6. Kebakaran Hutan dan Lahan
2. Banjir Bandang	7. Kekeringan
3. Cuaca Ekstrim	8. Letusan Gunungapi
4. Gelombang tinggi dan Abrasi	9. Tanah Longsor
5. Gempabumi	10. Tsunami

Sumber: KRB Kabupaten Blitar, 2019-2023

Kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi wilayah Kabupaten Blitar yang berada di wilayah pegunungan dan perbukitan seperti di Kecamatan Bakung, Panggungrejo, Wates, Binangun, Kademangan, Kesamben, Selorejo, Doko, Gandusari dan Kecamatan Wlingi. Kawasan rawan bencana banjir yaitu kawasan sekitar daerah aliran Sungai Brantas yang meliputi; Kecamatan Udanawu, Wonotirto, Sutojayan, Panggungrejo, Binangun, Kademangan, Wonodadi, Wlingi, Talun, Selopuro dan Kecamatan Kesamben.

Kawasan rawan bencana letusan gunung api meliputi wilayah Kabupaten Blitar Utara khususnya wilayah yang berada di sekitar Gunung Kelud dan di sekitar jaringan aliran lahar (di Desa Pasirharjo dan sekitar Desa Soso) serta di sekitar jaringan aliran lahar yaitu sekitar Sungai Lekso, Sungai Putih, Sungai Lahar, Sungai Darapdurgo, Sungai Kuning, Sungai Semut (Kali Badak, Kali Termas I dan Kali Termas II). Kawasan rawan bencana tsunami mencakup Mencakup kawasan pantai selatan (Kecamatan Wates, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Bakung) Kawasan rawan bencana lainnya antara lain kawasan rawan bencana angin kencang atau angin puting beliung terdapat di seluruh kecamatan; kawasan rawan bencana kekeringan meliputi Kecamatan Nlegok, Bakung, Wonotirto, Kademangan, Panggungrejo, Wates dan Kecamatan Binangun; kawasan rawan bencana yang berhubungan dengan

wilayah tambang atau galian tipe C yaitu meliputi Kecamatan Gandusari, Bakung, Wates, Wlingi, Wonotirto, Panggungrejo dan Kecamatan Kademangan; dan

kawasan rawan bencana sosial yang berhubungan dengan daerah yang berpotensi rawan konflik.

Penilaian ketangguhan desa telah menjadi salah satu fokus penting bersamaan meningkatnya usaha peningkatan ketangguhan desa menyusul tingginya jumlah kejadian bencana berskala katastrofik (merenggut nyawa dan harta benda dalam jumlah sangat besar) di seluruh dunia pada dua dekade terakhir ini. Penilaian ketangguhan desa bertujuan menghasilkan data dasar (*baseline*) tentang aspek-aspek yang mempengaruhi ketangguhan desa pada tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Hasil penilaian digunakan untuk landasan pengambilan keputusan tindakan meningkatkan ketangguhan desa serta memonitor kemajuannya.

Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR), mendefinisikan ketangguhan desa sebagai: “Kemampuan sistem, komunitas atau masyarakat yang terkena bencana untuk melawan, menyerap, menampung untuk dan pulih dari dampak bencana secara tepat waktu dan efisien, termasuk melalui pelestarian dan pemulihan struktur dan fungsi dasarnya yang penting”. Ini adalah konsep yang menawarkan pendekatan yang lebih sistematis dan lintas sektor sebagai pendekatan pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan sektor kemanusiaan.

Kerangka kerja penilaian ini mengadopsi standar-standar ketangguhan desa dan kelurahan pada SNI 8357:2017 yang mengatur tentang Ketangguhan Desa dan Kelurahan terhadap Bencana. SNI 8357:2017 mengadaptasi model DROP (*Disaster Resilience of Place*). Pilihan ini didasarkan pada rekomendasi ahli. Meskipun DROP dirancang untuk diterapkan di Amerika Serikat, tetapi kesamaan-kesamaan sifat dasar ketangguhan desa membuatnya dapat diterapkan ke konteks negara lain. DROP juga telah di adopsi dan diadaptasi di beberapa negara lain, seperti di Australia, Norwegia, Thailand, dan Zimbabwe. Model tersebut mengamsuksikan bahwa sistem alam berinteraksi dengan sistem sosial kemudian menciptakan kerentanan dan sekaligus ketangguhan desa yang melekat (*inheren*) pada komunitas tersebut.

Model DROP (*Disaster Resilience of Place*) adalah kerangka konseptual yang menekankan bahwa ketangguhan suatu tempat terhadap bencana ditentukan oleh: kerentanan sosial, kapasitas adaptif masyarakat, paparan dan bahaya alam, dan konteks lingkungan dan ekonomi lokal. Model DROP digunakan untuk memberikan pendekatan yang holistik dan kontekstual dan cocok untuk kondisi unik tiap desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar, kemudian mendorong pemahaman bahwa ketangguhan tidak hanya

soal infrastruktur, tapi juga mencakup kapasitas sosial, pengetahuan lokal, dan sistem kelembagaan, serta diintegrasikan dengan SNI 8357:2017 untuk menciptakan alat penilaian yang lebih komprehensif dan berbasis data lokal. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan SNI 8357:2017 dilakukan untuk memperkuat pendekatan holistik dan kontekstual. Kombinasi ini menghasilkan alat penilaian yang kuat, fleksibel, dan relevan dengan kondisi Indonesia.

Model DROP memiliki kerangka yang komprehensif untuk menilai ketangguhan desa masyarakat secara menyeluruh serta dapat menunjukkan dengan tepat komponen spesifik yang dapat meningkatkan atau mengurangi ketahanan bencana. Selanjutnya, DROP memungkinkan kita memahami dan membandingkan pola ketangguhan desa masyarakat secara spasial. Oleh karenanya penilaian ketangguhan desa diperlukan di Kabupaten Blitar yang mencakup 22 kecamatan untuk melihat bagaimana hasil penilaian tersebut serta melihat rekomendasi dari hasil penilaian. Tujuan dari penilaian ketangguhan desa Kabupaten Blitar adalah sebagai sarana pendidikan dan penyadaran risiko bencana pada masyarakat dan semua pihak, untuk menyediakan data dasar (*base line*) ketangguhan desa di unit pemerintahan terkecil Republik Indonesia, dan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

B. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian penilaian ketangguhan di Kabupaten Blitar meliputi FGD, observasi, dan telaah dokumentasi yang dilakukan di dari 248 desa/kelurahan. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan aplikasi **Katalog Kesiapsiagaan BNPB**. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan hasil dari penilaian ketangguhan desa yang dilakukan di Kabupaten Blitar. Hal ini sebagai upaya membangun ketangguhan masyarakat terutama di desa/kelurahan terhadap bencana dan bagian dari melindungi masyarakat Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Klasifikasi tingkat ketangguhan sebuah desa/kelurahan dalam menghadapi bencana dibagi kedalam tiga kriteria berdasarkan Katalog Kesiapsiagaan BNPB yaitu desa/kelurahan tangguh bencana pratama (skor < 58,33), desa/kelurahan tangguh bencana madya (skor 58,33 - 83,33), dan desa/kelurahan tangguh bencana utama (skor > 83,33).

Secara keseluruhan, penilaian ketangguhan desa/kelurahan terbagi ke dalam lima komponen utama berdasarkan Panduan Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan BNPB Tahun 2021, di mana setiap komponen terdiri atas sejumlah indikator. Dalam hal ini,

indikator dimaknai sebagai variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas suatu kebijakan dalam meningkatkan ketangguhan terhadap bencana. Adapun rincian dari kelima komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komponen 1: Layanan Dasar, mencakup 14 indikator.
2. Komponen 2: Regulasi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana, terdiri dari 5 indikator.
3. Komponen 3: Pencegahan dan Mitigasi, memiliki 3 indikator.
4. Komponen 4: Kesiapsiagaan Darurat, mencakup 6 indikator.
5. Komponen 5: Kesiapsiagaan Pemulihan, terdiri dari 4 indikator.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kategori Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang telah didapat, diketahui bahwa dari 248 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar sebanyak 170 desa/kelurahan berada pada kategori pratama dengan indeks skor < 58.33 , sebanyak 61 desa/kelurahan berada pada kategori madya dengan indeks skor $58.33 - 83.33$ dan 17 desa/kelurahan berada pada kategori utama dengan indeks skor > 83.33 .

Kategori Pratama adalah tingkat awal yang dicirikan dengan:

- a. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan;
- b. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB;
- c. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat;
- d. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/Kelurahan;
- e. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan;
- f. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

Kategori Madya adalah tingkat awal yang dicirikan dengan:

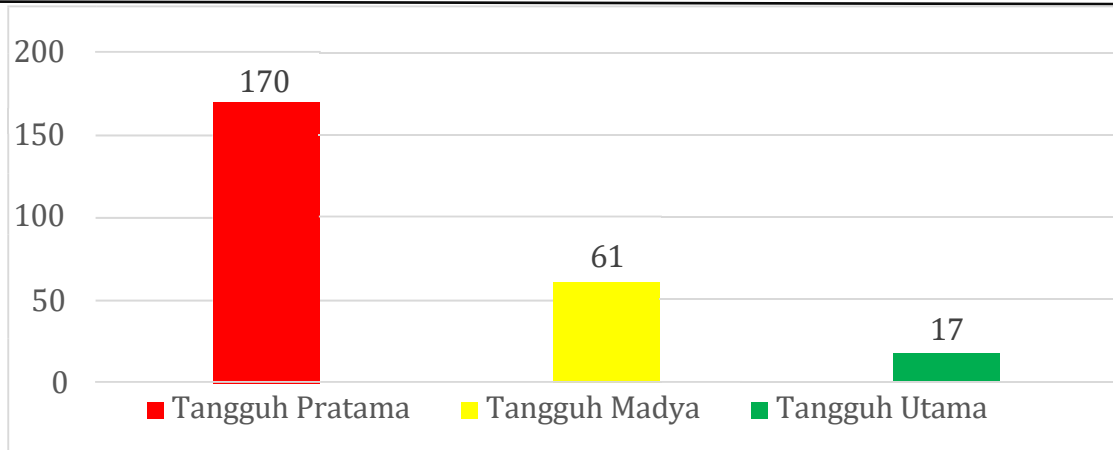
- a. Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa atau kelurahan;
- b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa;
- c. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif;

- d. Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif;
- e. Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatankegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji;
- f. Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.

Kategori Utama adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh sebuah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam program ini. Tingkat ini dicirikan dengan:

- a. Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk PerDes atau perangkat hukum setingkat di kelurahan;
- b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes;
- c. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/kelurahan, yang berfungsi dengan aktif;
- d. Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya;
- e. Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan;
- f. Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

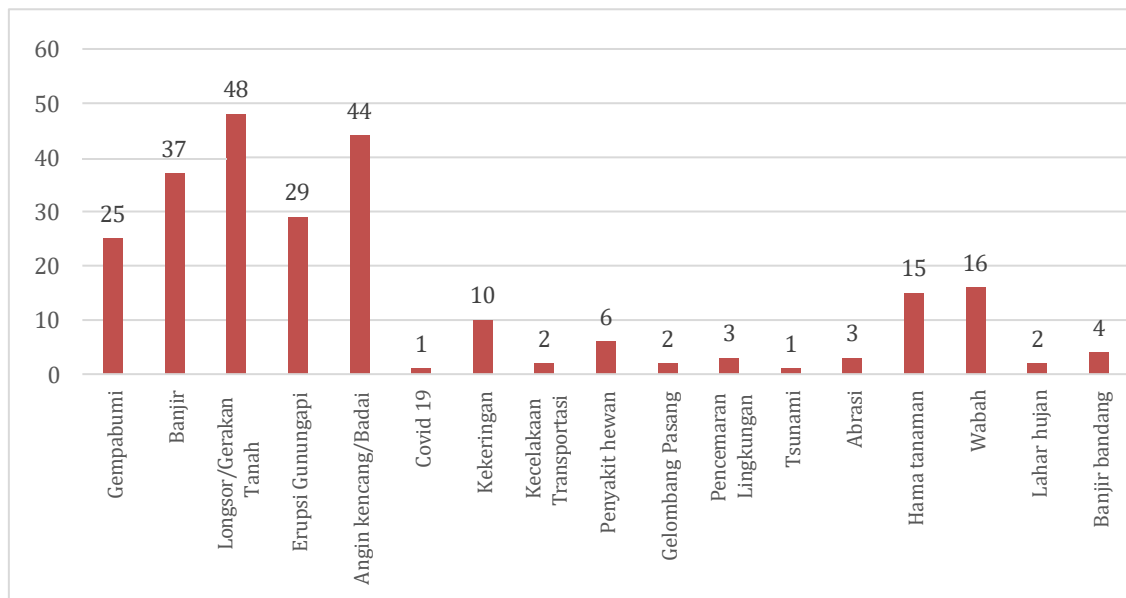
Lebih jelasnya, kategori penilaian ketangguhan desa/kelurahan (PKD) di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Grafik 1 di bawah ini:



Grafik 1. Kategori Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Blitar

2. Prioritas Ancaman di Desa/Kelurahan Kabupaten Blitar

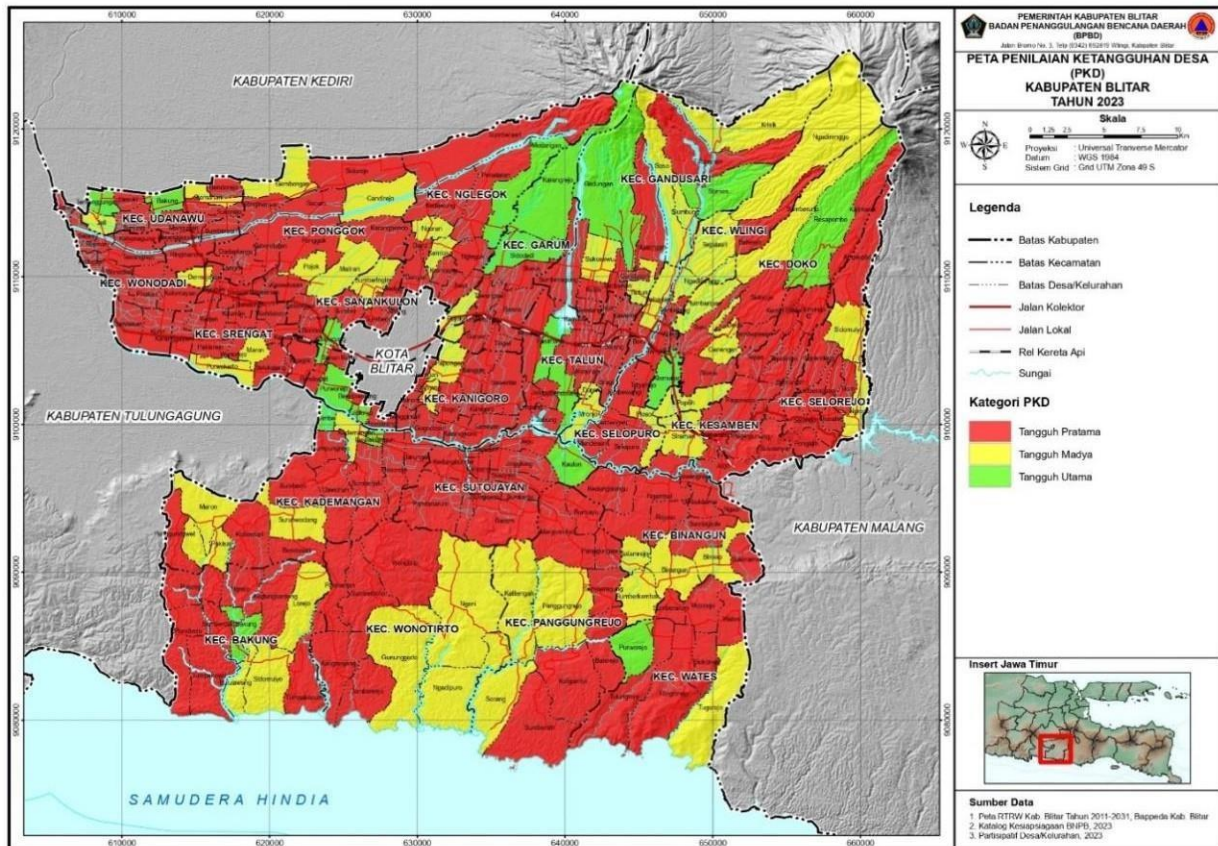
Setelah pengkategorian desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar, terdapat sekitar 17 prioritas ancaman yang dipilih oleh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar. Prioritas ancaman tersebut antara lain gempa bumi, banjir, longsor, erupsi gunungapi, angin kencang/badai, covid-19, kekeringan, kecelakaan transportasi, penyakit hewan ternak, gelombang pasang, pencemaran lingkungan, tsunami, abrasi, hama tanaman, wabah, lahar hujan, dan banjir bandang. Lebih jelasnya, prioritas ancaman di desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar digambarkan pada grafik 2 di bawah ini:



Grafik 2. Prioritas Ancaman di Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar

3. Peta Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan (PKD) Kabupaten Blitar

Hasil analisis data kategori desa/kelurahan Kabupaten Blitar berdasarkan indeks skor yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) digambarkan pada peta penilaian ketangguhan desa (PKD) di bawah ini:



Gambar 3. Peta Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) Kabupaten Blitar

Sumber: (BPBD, 2023)

Berdasarkan Peta Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) Kabupaten Blitar diketahui bahwa dari total 248 desa/kelurahan sebanyak 170 desa/kelurahan berada pada kategori pratama, 61 desa/kelurahan berada pada kategori madya dan 17 desa/kelurahan berada pada kategori utama. Berdasarkan hasil tersebut strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan desa yang masih berada pada kategori pratama adalah:

1. Melakukan kerjasama dengan dinas/lembaga/organisasi untuk indentifikasi kebutuhan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan/peningkatan penyelenggaraan layanan pendidikan formal/non formal di Desa/Kelurahan.
2. Pengusulan penyelenggaraan layanan keagamaan melalui mekanisme Musrenbang Desa/Kelurahan hingga Musrenbang Kabupaten/Kota, sesuai SPM bidang keagamaan.
3. Mengusulkan penyusunan peraturan desa tentang kebudayaan, baik melalui Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mengusulkan kegiatan kebudayaan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan.
4. Mengusulkan penyusunan peraturan desa tentang perlindungan keamanan Desa, baik melalui Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mengusulkan kegiatan perlindungan keamanan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan.

5. Mengusulkan pembentukan lembaga, penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan peraturan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Mengusulkan pembentukan lembaga, penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan peraturan untuk layanan khusus difabel.
7. Mengusulkan alokasi anggaran mekanisme Musrenbang atau dalam musyawarah penyusunan RPJMDesa/RKPDesa/kelurahan.
8. Mengusulkan program penyediaan sarana/prasarana transportasi.
9. Melakukan evaluasi, perencanaan dan pelaksanaan program layanan air bersih
10. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik OPD terkait, akademisi, praktisi pangan dan gizi serta lembaga lainnya.
11. Mengusulkan program pemberdayaan UMKM dan/atau pengembangan ekonomi melalui BUMDES dalam Musrenbang Desa/Kelurahan.
12. Mengusulkan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana komunikasi/informasi dalam RKPDDes maupun RKP Kelurahan.
13. Melakukan monitoring, evaluasi, perencanaan dan pelaksanaan terhadap pelayanan administrasi dan kependudukan.
14. Pengusulan penyelenggaraan layanan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui mekanisme Musrenbang Desa/Kelurahan hingga Musrenbang Kabupaten/Kota, sesuai SPM bidang lingkungan hidup.
15. Mengusulkan pengkajian risiko bencana melalui mekanisme Musrenbang Desa/Kelurahan.
16. Mengusulkan kegiatan penyusunan dokumen RPB menggunakan anggaran desa.
17. Mengusulkan program dan kegiatan pelatihan penanggulangan bencana dalam RPJMDesa/Kelurahan melalui musrenbang desa/kelurahan.
18. Mengusulkan pembentukan organisasi/kelompok Penanggulangan Bencana Desa melalui Musrenbang
19. Mengusulkan ada standar operasional prosedur atau sejenisnya mengenai kerjasama dengan pihak luar dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
20. Mengusulkan kegiatan pencegahan bencana menggunakan anggaran desa.
21. Mengusulkan kegiatan mitigasi bencana menggunakan anggaran desa.
22. Mengusulkan kegiatan sosialisasi pengetahuan kebencanaan menggunakan anggaran desa.
23. Desa/Kelurahan segera mengembangkan penyediaan peringatan bahaya efektif.

24. Desa/Kelurahan melakukan penyusunan standar prosedur penyebaran peringatan bahaya kepada seluruh masyarakat termasuk penyandang difabel.
25. Menyusun rencana evakuasi bencana dengan melibatkan masyarakat berpotensi terdampak bencana.
26. Menetapkan jalur evakuasi menuju tempat aman sesuai jenis ancaman.
27. Desa/Kelurahan perlu merencanakan dan menetapkan tempat pengungsian bencana dengan melibatkan masyarakat berpotensi terdampak bencana serta berkoordinasi dengan BPBD/dinas/ lembaga/organisasi dalam sistem kesiapsiagaan setempat.
28. Desa/Kelurahan perlu melakukan uji kesiapsiagaan/simulasi menghadapi bencana secara rutin untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dan seluruh sistem kesiapsiagaan.
29. Mengusulkan kegiatan penyusunan mekanisme penilaian pasca bencana secara mandiri menggunakan anggaran desa.
30. Mengusulkan kegiatan penyusunan mekanisme pemulihan dini mandiri menggunakan anggaran desa.
31. Mengusulkan kegiatan penyusunan mekanisme pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan dan akuntabel menggunakan anggaran desa.
32. Mengusulkan kegiatan perencanaan untuk membangun fasilitas layanan dasar secara lebih baik menggunakan anggaran desa.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penilaian ketangguhan desa/kelurahan di Kabupaten Blitar yakni dari 248 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar sebanyak 170 desa/kelurahan berada pada kategori pratama dengan indeks skor < 58.33 , sebanyak 61 desa/kelurahan berada pada kategori madya dengan indeks skor $58.33 - 83.33$ dan 17 desa/kelurahan berada pada kategori utama dengan indeks skor > 83.33 .

Terdapat sekitar 17 prioritas ancaman yang dipilih oleh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar. Prioritas ancaman tersebut antara lain gempa bumi, banjir, longsor, erupsi gunungapi, angin kencang/badai, covid-19, kekeringan, kecelakaan transportasi, penyakit hewan ternak, gelombang pasang, pencemaran lingkungan, tsunami, abrasi, hama tanaman, wabah, lahar hujan, dan banjir bandang. Lebih jelasnya, prioritas ancaman di desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar.

Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah melakukan pendekatan strategis yang holistik dan partisipatif melalui penguatan layanan dasar, perlindungan sosial, dan sistem kesiapsiagaan bencana. Pemerintah desa/kelurahan perlu memperkuat kolaborasi lintas

sektor dengan dinas, lembaga, dan organisasi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan, keagamaan, kebudayaan, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan difabel. Selain itu, penguatan kelembagaan dan penyusunan regulasi desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi dasar penting untuk mewujudkan tata kelola yang inklusif. Dalam konteks kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, desa harus menetapkan jalur evakuasi, tempat pengungsian, sistem peringatan dini, serta SOP penyebaran informasi yang inklusif, disertai uji simulasi secara berkala. Semua inisiatif tersebut perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan desa seperti RPJMDesa dan RKPDesa, serta didukung dengan alokasi anggaran yang tepat melalui Musrenbang, guna menjamin kesinambungan program dan meningkatkan ketahanan desa terhadap berbagai risiko sosial maupun bencana alam.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Pada penulisan artikel ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, memberikan arahan dan juga mensukseskan artikel ini. Pihak-pihak yang telah membantu antara lain: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Kepala Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar serta Tim Fasilitator dari Pujiono Centre Yogyakarta.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023*. www.dibi.bnpb.go.id.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Sebaran Kejadian Bencana Alam Periode 1-12 Juli 2024*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. www.bnpb.go.id.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Panduan Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan*. Direktorat Kesiapsiagaan Kedeputian Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). https://eprints.upnyk.ac.id/35367/1/4.Panduan%20Penilaian%20Ketangguhan%20Bencana%20Desa%20dan%20Kelurahan%202021_REVISI.pdf
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar. (2019). *Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2019-2023*. <https://opendata.blitarkab.go.id/>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar. (2023). *Peta Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) Kabupaten Blitar Tahun 2023*. Laporan Penilaian Ketangguhan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2023. <https://www.blitarkab.go.id>

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Kabupaten Blitar Dalam Angka*. Blitar CV Azka Putra Pratama.
- Badan Standardisasi Nasional. (2020) *Panduan Penerapan SNI 8357:2017 Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana*. Jakarta. Badan Standardisasi Nasional.
- Damayanti, Didit. (2018). *Pengaruh Simulasi Tentang Cara Menghadapi Bencana Dengan Kemampuan Penanganan Bencana Gempabumi di MAN 3 Kediri*. *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta*, 350–353. <http://nursingjurnal.respati.ac.id/index.php/JKRY/index>.
- Kurniawan, Ficky Adi, Fauziah, Rosynanda Nur, & Rohmatulloh, Dimas Panji Agung. (2024). *Relevansi Dan Peran Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Pemahaman Peserta didik Tentang Krisis Global Warming*. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 3(1), 55–67. <https://doi.org/10.20961/ijed.v3i1.1074>
- Pemerintah Kabupaten Blitar. (2024). *Jumlah Kejadian Bencana (Per Bencana)*. Satu Data Kabupaten Blitar. <https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-kejadian-bencana-per-bencana-3zvww9z5>
- Priambodo, Arie. 2013. *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syahadat, R. M., Ichsan, D. R., & Putra, S. (2022). *Pemanasan Global Dan Kerusakan Lingkungan Apakah Masih Menjadi Isu Penting Di Indonesia*. *Jurnal Envirotek*, 14(1), 43–50.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang *Penanggulangan Bencana*.
- UNISDR. 2009. *Terminology on Disaster Risk Reduction*.
- Wibowo, Nugroho Budi, & Sembri, Juwita Nur. (2016). *Analisis Peak Ground Acceleration (PGA) dan Intensitas Gempabumi berdasarkan Data Gempabumi Terasa Tahun 1981 - 2014 di Kabupaten Bantul Yogyakarta*. *Indonesian Journal of Applied Physics*, 6(01), 65. <https://doi.org/10.13057/ijap.v6i01.1804>